



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN—PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Analisis Akar Kekerasan Berkepanjangan
antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka
pada Tahun 2018-2019

Skripsi

Oleh

Indita Putri Sindaran

2017330165

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN—PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Analisis Akar Kekerasan Berkepanjangan
antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka
pada Tahun 2018-2019

Skripsi

Oleh

Indita Putri Sindaran

2017330165

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Indita Putri Sindaran
NPM : 2017330165
Judul : Analisis Akar Kekerasan Berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka pada Tahun 2018-2019

Telah diuji dalam Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

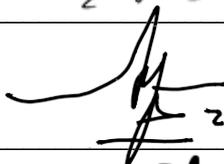
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Mangadar Situmorang, Ph.D.

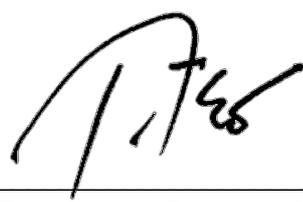
: 
_____ 21/7/2021

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han):

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Surat Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indita Putri Sindaran

NPM : 2017330165

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisis Akar Kekerasan Berkepanjangan antara
Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka pada
Tahun 2018-2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Juli 2021



Indita Putri Sindaran

2017330165

KATA PENGANTAR

Mengingat kembali ke cikal bakal diputuskannya topik ini untuk dijadikan skripsi yang utuh, saya masih memutar otak hingga beberapa hari sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Mas Nyoman selaku dosen kelas Rancangan Penelitian KBI 1 untuk mencari usulan topik yang tidak hanya dapat diterima olehnya tapi juga menarik bagi diri sendiri supaya tidak terlalu menekan mental selama proses penyelesaiannya.

Buah pikiran ini muncul di tengah murkanya *netizen* karena terdokumentasi dan tersebar luasnya tindak diskriminasi rasial di Amerika Serikat sampai menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah, George Floyd. Melihat banyaknya partisipasi *netizen* Indonesia yang berapi-api dalam menyebarkan pesan *#BlackLivesMatter* sebagai gerakan sosial yang secara keseluruhan ingin menghapuskan segala jenis kekerasan yang berbasis rasial terhadap orang berkulit hitam, pada waktu yang kurang lebih berdekatan, salah satu akun Instagram saluran televisi lokal membagikan hasil wawancara dengan mahasiswa Papua soal rasisme di Indonesia yang lumayan miris dan mengoyak perasaan. Dari sana, lalu terlintas di benak pikiran bahwa kasus Papua Barat sebagai sebuah permasalahan *that is close to home* dengan kasus kekerasan atau diskriminasi rasial yang serupa tapi, menurut saya pribadi, belum mendapat perhatian sebesar ini oleh masyarakat Indonesia karena maraknya misinformasi terkait kasus ini yang membuat Orang Asli Papua dipandang keterlaluhan untuk menuntut kemerdekaan dari NKRI.

Oleh sebab itu selain sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 Jurusan Ilmu HI UNPAR, saya melalui tulisan ini setulusnya berharap dapat berkontribusi dalam memberikan perspektif baru pada konflik yang menyengsarakan semua pihak ini, baik itu kelompok-kelompok yang memang terlibat di lapangan atau sekedar penonton di rumah yang terus menunggu kabar perkembangan kasus ini. Selain itu dengan segala hormat dan tanpa mendiskreditkan karya orang lain sedikit pun, saya juga berharap dapat membantu menyeimbangkan informasi yang beredar agar pembaca yang tercapai oleh tulisan ini dapat lebih bijak menilai kasus Papua Barat dengan menyediakan bahan bacaan yang lebih berbobot dan menyeluruh dibandingkan berita yang biasa beredar tapi *less intimidating than* kebanyakan buku di pasaran.

Di samping itu, saya ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang berkontribusi besar dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini:

1. Kepada papi, mami, dan koko, atas segala dukungan secara moral dan finansial serta tekanan yang dibutuhkan sebagai motivasi utama agar segera menyelesaikan jenjang studi sarjana.
2. Kepada Mas Mangadar Situmorang, atas segala bimbingan yang tidak jera menuntun penulis hingga dapat ke titik ini di tengah padatnya jadwal beliau

- yang harus menjabat sebagai Rektor UNPAR. Merupakan sebuah kehormatan dan bantuan besar untuk dapat bekerja di bawah naungannya.
3. Kepada Mas I Nyoman Sudira dan Mbak Vrameswari Omegawati sebagai tim penguji sidang sekaligus tim yang secara langsung turun tangan dalam proses resolusi kasus Papua Barat, atas kesempatannya untuk bisa menguji hasil penelitian ini melalui kritik dan sarannya sehingga bisa mengubah tulisan ini menjadi lebih baik.
 4. Kepada seluruh dosen HI UNPAR, atas ilmu dan cara pandangnya yang telah diberikan sebagai pembekalan penulis setelah belajar di UNPAR nanti.
 5. Kepada Ray Maximillian sebagai rekan hidup yang merangkap menjadi mentor dan *editor* pribadi, atas segala waktu dan ketabahannya menghadapi drama mental yang terus dihadapi penulis selama 4 tahun terakhir. Semoga akan tetap rela direpotkan dan diganggu hingga nanti-nanti, hehe.
 6. Kepada ESPE Doubt Club yang terdiri dari Dika Maulana, Fathur Evans, dan Rayhan Lingga, atas persahabatannya yang mewarnai keseharian penulis di UNPAR yang penuh akan lawakan, refleksi, dan cerita aneh bin ajaib lainnya yang membuka pikiran penulis terhadap sesuatu yang baru.
 7. Kepada Adam Amora dan Arin Adnadi, atas segala kebadutan yang telah melengkapi celah lelucon penulis dan Ray hingga mampu menjadi ©Mega Badut untuk mengurangi rasa jenuh bersama selagi mengerjakan skripsi. Terima kasih juga telah membawa Syifa Larasati yang lugu dan gemas ke tengah lingkaran setan ini.
 8. Kepada Delegasi Rusia sebagai kumpulan manusia *unfortunate* yang ingin diapresiasi, atas kerjasamanya dalam menghadapi Praktik Diplomasi selama 1 semester, tapi terlebih atas pertemanan yang berlanjut setelah melewati *grand summit*. *In addition to all of the 'alas'-es and 'felicitation'-s, always remember in your heart that "Nobody is safe until everybody is save."*
 9. Kepada Tina Shavira, Cory Aderia, Hellen Cania, Neta Nurul, Thea Nathalie, Zee Yusuf sebagai teman-teman yang selalu siap membantu pada setiap situasi yang penuh dengan kepanikan yang kadang kurang faedah.
 10. Kepada Dave Bernaiah sebagai rekan seperjuangan bimbingan dengan Mas Mangadar, atas kebingungan-kesotoyan mungilnya dan menjadi *unlikely friend* yang dipersatukan di penghujung kuliah.
 11. Kepada keluarga besar Rumah Hantu PMKT, *Red Troops*, dan UKM Aikido Dojo UNPAR, atas kesempatan dan pengalamannya yang memberikan banyak pelajaran dan cerita-cerita unik yang akan selalu dikenang oleh penulis.
 12. Kepada seluruh gerakan *#BlackLivesMatter*, atas segala usahanya untuk menunjukkan dunia bahwa diskriminasi terhadap ras minoritas masih marak

terjadi di tengah masyarakat modern dan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam struktur bermasyarakat agar dapat mewadahi semua golongan masyarakat dengan keadilan yang sesungguhnya. Semoga gugurnya George Floyd, *bless his soul*, mampu menginspirasi gerakan-gerakan lain agar memperjuangkan keadilan hak sesama manusia di seluruh dunia, terutama di Indonesia.

13. Terakhir dan sebagai penutup tentunya kepada diri sendiri, karena meski penelitian ini memang masih jauh dari kata sempurna tapi penulis tetap merasa bangga sebab telah melakukannya dengan seluruh kemampuan dan (meski mepet tapi) bisa mengumpulkan dengan tepat waktu.

Bandung, 28 Juli 2021



Indita Putri Sindaran

ABSTRAK

Nama : Indita Putri Sindaran

NPM : 2017330165

Judul : Analisis Akar Kekerasan Berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka pada Tahun 2018-2019

Penelitian ini berusaha membahas konflik yang telah berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka yang terus terperangkap dalam relasi negara-kelompok yang dipenuhi dengan kekerasan dan tidak dapat keluar dari pola hubungan tersebut untuk mencari solusi dengan cara damai hingga sekarang. Dalam rangka menjelaskan deviasi di balik kesulitan untuk dihentikannya siklus keji tersebut, penulis menggunakan teori *Protracted Social Conflict* dan studi terhadap kasus kekerasan pada tahun 2018-2019 dengan memanfaatkan data sekunder. Pembatasan tersebut didasari oleh skala kekerasan yang tidak hanya tereskalasi tapi juga bertransformasi hingga mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah ekstrem: kembali menurunkan lebih banyak aparat keamanan, menangkap sejumlah aktivis, serta mematikan internet. Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat ketidakselarasan akan arti ‘kesejahteraan’ dan apa yang menjadi masalah di mata Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka karena kurangnya komunikasi 2 arah yang produktif. Aktor internasional juga turut melakukan disrupsi dalam proses komunikasi yang ikut serta merumitkan penyelesaian pada kasus Papua Barat tapi belum terakomodir dalam pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Alhasil, *enemy perceptions* dari akumulasi ketidakpercayaan dan keluhan Organisasi Papua Merdeka membentuk *rival nationalism* yang menjadi ancaman hingga memojokkan Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Integritas Wilayah, Kekerasan, Konflik Sosial Berkepanjangan, Organisasi Papua Merdeka, Papua Barat, Pemerintah Indonesia, Penentuan Nasib Sendiri, Persepsi Musuh, Rivalitas Nasionalisme, Separatisme.

ABSTRACT

Name : Indita Putri Sindaran

NPM : 2017330165

Title : *The Analysis on Root Causes of Protracted Violence between the Indonesian Government and the Free Papua Movement in 2018-2019*

This research aimed to discuss the ongoing dispute between the Indonesian Government and Free Papua Movement that continued to be trapped in conflictual state-group relationship and had not been able to get out of it to find a peaceful solution until now. In order to disclose the deviations behind difficulty to end this vicious cycle, author used Protracted Social Conflict theory and a case study of violence occurred in a time span of 2018-2019 by utilizing secondary data. This specification was based on the scope violence which not only escalated and transformed the conflict to the point where the Indonesian Government was pressured and felt the need to take extraordinary measures: deploying even more security forces, arresting quite a sum of human rights activists, and shutting down the internet there. The author explored that there had been discrepancy about the meaning of 'prosperity' and what constitutes as an actual problem between the eyes of Indonesian Government and Free Papua Movement due to lack of productive two-way communication. International actors also participated in convoluting the settlement of the West Papua dispute, but moreover had measly been facilitated in the approaches taken by the Indonesian Government. Ergo, the enemy perceptions from the accumulation of mistrust and grievances pushed Free Papua Movement to formed a sense of rival nationalism which had become a threat that cornered the Indonesia Government.

Keywords: Territorial Integrity, Violence, Protracted Social Conflict, Free Papua Movement, West Papua, Indonesian Government, Self-Determination, Enemy Perceptions, Rival Nationalism, Separatism.

DAFTAR ISI

Tanda Pengesahan Skripsi	i
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vi
<i>Abstract</i>.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kajian Literatur	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	16
1.6. Metodologi Penelitian.....	25
1.6.1. Metode Penelitian	25
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	26
1.7. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II: DI BALIK TUNTUTAN <i>SELF-DETERMINATION</i> ORGANISASI PAPUA MERDEKA.....	28

2.1. Ketidakadilan Politik dan Keamanan	29
2.2. Ketidakadilan Ekonomi	33
2.2.1. Penguasaan dan Perusakan Alam Papua Barat.....	34
2.2.2. Disparitas Ekonomi dan Pembangunan	37
2.3. Ketidakadilan Budaya.....	40
2.3.1. Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)	40
2.3.2. Indonesianisasi.....	43
2.4. Garis Besar Di Balik Tuntutan <i>Self-Determination</i> OPM.....	44
 BAB III: FAKTOR <i>INPUT</i> PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	 46
3.1. Gagasan Indonesia	46
3.1.1. Pancasila.....	49
3.1.2. UUD 1945	50
3.2. Kelembagaan Indonesia	51
3.2.1. Pembagian Kekuasaan	52
3.2.2. Kekuatan Ekonomi.....	53
3.2.3. Kekuatan Militer	55
3.2.4. Agenda Pemerintah Indonesia di Ranah Global.....	58
3.3. Basis Fisik Indonesia	60
3.3.1. Wilayah dan Populasi NKRI	60
3.3.2. Integritas NKRI	63
3.4. Garis Besar Faktor <i>Input</i> Proses Pengambilan Keputusan dalam Menjaga Integritas NKRI.....	66
 BAB IV: <i>PROTRACTED SOCIAL CONFLICT</i> DALAM PERSOALAN PAPUA BARAT TAHUN 2018-2019	 68
4.1. <i>Communal Content</i>	69
4.2. <i>Deprivation of Human Needs</i>	70

4.3. Government's Role	73
4.4. International Linkages	76
4.5. Dinamika Proses Interaksi.....	79
4.5.1. Upaya OPM dalam Menuntut <i>Self-Determination</i>	79
4.5.2. Manuver Kebijakan Besar Pemerintah Indonesia di Tanah Papua untuk Mempertahankan <i>Territorial Integrity</i>	83
4.5.3. <i>Rival Nationalism</i> dalam Hubungan Konflikual Berkepanjangan antara OPM dan NKRI.....	86
4.5.4. Kehadiran Aktor Internasional	90
4.6. Eskalasi Kekerasan pada Bentrok tahun 2018-2019 dan Makna Kesejahteraan dalam <i>Prosperity Approach</i>.....	94
BAB V: PENUTUP	97
5.1. Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR SINGKATAN

AMP	Aliansi Mahasiswa Papua
AS	Amerika Serikat
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BT	Bujur Timur
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DI / TII	Daarul Islam / Tentara Islam Indonesia
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FORERI	Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GM	Gerakan Mahasiswa
HAM	Hak Asasi Manusia
HA	Hektare
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
Inpres	Instruksi Presiden
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KONGA	Kontingen Garuda

Kopassus	Komando Pasukan Khusus
KNPB	Komite Nasional Papua Barat
KY	Komisi Yudisial
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LS	Lintang Selatan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LU	Lintang Utara
MA	Mahkamah Agung
Menhan	Menteri Pertahanan dan Keamanan
MK	Mahkamah Konstitusi
Migas	Minyak dan Gas Bumi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRP	Majelis Rakyat Papua
MUBES	Musyawaharah Besar Rakyat Papua
Narkoba	Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
NII	Negara Islam Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRFPB	Negara Republik Federal Papua Barat
OAP	Orang Asli Papua
OPM	Organisasi Papua Merdeka
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pepera	Penentuan Pendapat Rakyat
Permesta	Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta

PDB	Produk Domestik Bruto
PDP	Presidium Dewan Papua
PKI	Partai Komunis Indonesia
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNWP	Parlemen Nasional Papua Barat
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PRM 1	<i>Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future</i>
PRM 2	<i>Updating Papua Road Map: Peace Process, Youth Politics, and Papuan Diaspora</i>
PRRI	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSC	<i>Protracted Social Conflict</i>
PTFI	PT Freeport Indonesia
REPELITA	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RI	Republik Indonesia
SARA	Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
TAPOL	<i>Indonesian Human Rights Campaign</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
ULMWP	<i>United Liberation Movement of West Papua</i>
UN	<i>United Nations</i>

USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
Wantimpres	Dewan Pertimbangan Presiden
WNI	Warga Negara Indonesia
WPNCCL	<i>West Papua National Coalition for Liberation</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak rapat terakhir Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau yang disebut juga ‘*Act of Free Choice*’ pada akhir tahun 1969, Irian Jaya–nantinya menjadi Papua Barat¹ sampai terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2003–secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut mengundang protes dari sejumlah Orang Asli Papua (OAP) yang menduga bahwa pelaksanaan Pepera itu tidak sesuai dengan protokol yang seharusnya.² Kekecewaan serta amarah terkait ‘*Act of Free Choice*’ hingga disebut sebagai ‘*Act of No Choice*’³ ini lalu memicu perkembangan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan mengawali selisih pendapat berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia, dengan sekelompok OAP yang ingin memerdekakan diri dan Pemerintah Indonesia ingin menjaga integritas wilayah negara.⁴

¹ Untuk menghindari kekeliruan di kedepannya, “Papua Barat” yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kesatuan wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum terjadi pemekaran pada tahun 2003. Hal ini juga didasari atas rekognisi aktor di tingkat internasional yang mengenal potongan wilayah Papua dalam Indonesia sebagai “*West Papua*”.

² Malcolm Gault-Williams, “Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives,” *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 19, no. 4 (1987): pp. 32-43, <https://doi.org/10.1080/14672715.1987.10409792>, p.34.

³ Maire Leadbeater, “Media Blind Spot over West Papua,” *Pacific Journalism Review: Te Koako* 14, no. 1 (April 1, 2008): pp. 168-175, <https://doi.org/10.24135/pjr.v14i1.932>, p.168.

⁴ Malcolm Gault-Williams, “Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives,” *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 19, no. 4 (1987): pp. 32-43, <https://doi.org/10.1080/14672715.1987.10409792>, p.34.

Secara ideologi, OPM lahir berkat kesadaran sejumlah OAP untuk menentukan nasib sendiri bersama dengan semangat nasionalismenya.⁵ Meski terhimpun dengan nama ‘OPM’, pergerakan badan politik ini tidak banyak membuahkan hasil karena struktur internal OPM yang bergerak secara terpisah dan masing-masing kelompok dari 4 sub-aliran ini (Negara Republik Federal Papua Barat [NRFPB], *West Papua National Coalition For Liberation* [WPNCL], *Free West Papua Campaign* yang berbasis di London, dan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] serta Parlemen Nasional Papua Barat [PNWP]) saling bersaing dalam mencapai objektif kemerdekaan Papua Barat.⁶ Selain itu, stigmatisasi Pemerintah Indonesia yang melihat segala bentuk gerakan OPM sebagai aktivitas teroris yang penuh dengan kekerasan membuatnya tidak pernah menganggap OPM sebagai perwakilan resmi dari OAP.⁷

Pemerintah Indonesia secara konsisten telah dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penggunaan kekerasan dalam menekan gerakan OPM yang berusaha menuntut referendum agar segera diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dari sisi Papua Barat, gerakan pemberontakan OPM merupakan sebuah tanggapan OAP yang wajar terhadap keterlibatan badan militer Indonesia yang justru memperkeruh keadaan di Tanah Papua. Seiring dengan intensitas kehadiran badan kepolisian dan militer yang dimanuver ke wilayah Papua

⁵ Achmad Busrotun Nufus et al., “Papua’s Vertical Conflict in 2019: Existence of Free Papua Movement and United Nations Response,” *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research* 436 (2020): pp. 1-5, p. 2-3.

⁶ Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), “Policy Miscalculations on Papua” (Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), 2017), pp. 1-20, p. 2-4.

⁷ Kjell Anderson, “Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua,” *Genocide Studies and Prevention* 9, no. 2 (2015): pp. 9-25, <https://doi.org/10.5038/1911-9933.9.2.1270>, p. 19.

Barat, laporan akan penindasan terhadap OAP—yang meliputi *extrajudicial killings*, penyiksaan, *arbitrary detention*, dan penanganan buruk dalam menanggapi segala bentuk gerakan protes yang damai—ikut meningkat di Papua Barat.⁸ Terlebih, rasa geram OPM terhadap perilaku-perilaku perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia di Papua Barat terus meningkat karena fakta bahwa segala pelanggaran yang dilakukan oleh badan keamanan Indonesia yang telah terjadi hampir tidak pernah diakui dan ditindaklanjuti oleh institusi keadilan atau Pemerintah Indonesia.⁹

Riwayat kekerasan yang telah terjadi antara OPM dan Pemerintah Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga era Orde Baru, namun hubungan antar keduanya berangsur-angsur memburuk terutama saat memasuki abad ke-21. Frekuensi tindak kekerasan di Papua Barat terus meningkat khususnya setelah tahun 2010 dengan melibatkan masyarakat setempat, aparat keamanan, dan kelompok kriminal bersenjata. Pada masa kepresidenan Joko Widodo sendiri, terjadi banyak peristiwa berulang yang menggunakan kekerasan, seperti baku tembak OPM dengan Tentara Republik Indonesia (TNI) yang menewaskan 5 anggota OPM yang saat itu dituduh melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga setempat pada penghujung tahun 2014.¹⁰ Namun terlebih dari itu, terdapat juga beberapa insiden kunci dalam hubungan konflikual antara Pemerintah Indonesia dan OPM, seperti penyanderaan 1300 orang warga pada tahun 2017¹¹ dan maraknya penyerangan di sekitar PT Freeport Indonesia (PTFI) sepanjang tahun 2018.¹²

⁸ Amnesty International, *"Dont Bother, Just Let Him Die": Killing with Impunity in Papua* (Jakarta Pusat, Indonesia: Amnesty International Indonesia, 2018), p. 6-12.

⁹ Ibid, pp. 50-57.

¹⁰ Bambang Purwoko et al., "Tindak Kekerasan Di Papua (2010-2021)," 2021, pp. 1-139, p. 47.

¹¹ Ibid, p. 65.

¹² Ibid, p. 67-74.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Salah satu periode ketegangan isu Papua Barat terburuk dimulai dengan pengaduan bahwa terdapat sekelompok separatis Papua Barat yang diduga telah membunuh 19 pekerja konstruksi yang sedang membangun Jalan Tol Trans-Papua di kabupaten Nduga pada Desember 2018 silam.¹³ Gugatan ini didukung dengan fakta bahwa warga setempat yang secara terang-terangan menyampaikan penolakannya terhadap pembuatan jalan tol yang dibangun di atas Tanah leluhur yang sangat mereka muliakan. Tercatat dari akhir 2018 hingga awal 2019, bentrokan ini memaksa diungsikannya lebih dari 45 ribu warga setempat dan telah memakan lebih dari 182 korban jiwa.¹⁴ Meski demikian, kekerasan tidak berhenti terjadi dan kembali tereskalasi pada Agustus 2019 dengan murkanya OPM akan tuduhan yang ditujukan terhadap 43 mahasiswa Papua Barat yang sedang menimba ilmu di Pulau Jawa.¹⁵

Penuduhan ini memuat dugaan bahwa sekelompok mahasiswa Papua Barat telah merusak bendera pusaka Indonesia yang telah dikibarkan di halaman asrama tempat para mahasiswa ini bertinggal.¹⁶ Diketahui saat tentara, polisi, dan kelompok masyarakat setempat menemukan tiang bendera Merah Putih

¹³ Bilveer Singh, "Why Is West Papua in Constant Turmoil?," *The Diplomat* (The Diplomat, September 12, 2019), <https://thediplomat.com/2019/09/why-is-west-papua-in-constant-turmoil/>.

¹⁴ CNN Indonesia, "Tim Kemanusiaan: Konflik Nduga Renggut 182 Korban Jiwa," *CNN Indonesia*, August 14, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814152018-20-421279/tim-kemanusiaan-konflik-nduga-renggut-182-korban-jiwa>.

¹⁵ Jade Poa et al., "A Timeline of the Ongoing West Papua Protests Taking Over Java," trans. Jade Poa, *A Timeline of the Ongoing West Papua Protests Taking Over Java* (Vice, August 27, 2019), <https://www.vice.com/en/article/8xwn4b/a-timeline-of-the-ongoing-west-papua-protests-taking-over-java>.

¹⁶ Hillary Leung, "What to Know About the Protests in Indonesia's West Papua," *Time* (Time, August 29, 2019), <https://time.com/5664107/indonesia-west-papua-independence-protests/>.

yang rusak, mereka mengepung dan merusak asrama yang ditempati oleh para mahasiswa Papua Barat sambil mengutarakan kata-kata hinaan yang rasis.¹⁷ Dorlince Iyowau, selaku juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), mengaku bahwa dirinya telah mengajukan jalan negosiasi dan hukum tetapi ditolak oleh pihak keamanan yang masih mengacau di sekitar asrama. Setelah diselidiki lebih lanjut, salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan seorang politisi setempat yang memang secara aktif menyebarkan ujaran rasis yang menargetkan mahasiswa Papua Barat.¹⁸

Kerusuhan pecah pertama kali di Manokwari beberapa hari setelah tuduhan, pembubaran unjuk rasa yang dilakukan oleh AMP di Malang, serta hoaks yang menyebarkan berita bahwa terdapat mahasiswa Papua Barat yang tewas terbunuh didengar oleh OPM yang berada di Papua Barat. Bentuk protes anti-rasisme lalu menyebar ke kota-kota lain, seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deiyai, dan Jayapura. Meski demikian, keadaan ‘damai’ di Papua Barat tidak berlangsung lama karena pada tanggal 23 September 2019 kerusuhan kembali terjadi di Jayapura dan Wamena karena hoaks guru melontarkan kata rasis yang ditujukan ke OAP di sekolah.¹⁹ Untuk menanggapi kericuhan di Papua Barat, Indonesia kembali menerapkan kebijakan yang berat: mengerahkan lebih dari

¹⁷ BBC News, “Papua Protests: Racist Taunts Open Deep Wounds,” BBC News (BBC, August 23, 2019), <https://www.bbc.com/news/world-asia-49434277>.

¹⁸ Rachmawati, “Kaleidoskop 2019: Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Di Surabaya,” KOMPAS.com (Kompas.com, December 26, 2019), <https://surabaya.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019--pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya?page=all>.

¹⁹ Robertus Belarminus, ed., “KALEIDOSKOP 2019: Kerusuhan Di Papua, Buntut Kasus Rasial Dan Hoaks,” KOMPAS.com (Kompas.com, December 30, 2019), <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all>.

6000 personil militer untuk menghadang gerakan massa, mematikan koneksi internet untuk mencegah penyebaran hoaks atau disinformasi, dan menahan puluhan aktivis supaya tidak ikut merunyamkan situasi.²⁰ Kerusuhan yang terjadi di 7 wilayah Papua Barat ini tidak hanya memakan lebih dari 30 korban jiwa dan lebih banyak lagi korban luka-luka,²¹ tetapi juga menimbulkan pengevuasian lebih dari 16.000 orang imigran dari Wamena,²² serta kerugian material yang sangat jauh dari kata sedikit.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam membahas topik ini, penulis membatasi penelitian yang mengacu pada kekerasan antara Pemerintah Indonesia dan OPM di Tanah Papua antara tahun 2018-2019. Pembatasan ini dilakukan dengan mengobservasi eskalasi kekerasan yang terbilang pesat dalam rentang waktu kurang dari satu tahun dan dampak kericuhan tersebut yang tidak hanya menimbulkan banyak korban warga sipil tetapi sampai mampu mentransformasi opresi yang tadinya hanya bersifat lokal dan lalu meluas ke Pulau Jawa. Terlebih, keputusan ekstrem Pemerintah Indonesia untuk mematikan akses internet di wilayah Papua memperlihatkan betapa rentan dan krusialnya penanggulangan kericuhan agar tidak mengundang *public outcry* dengan skala yang lebih besar.

²⁰ Hillary Leung, "What to Know About the Protests in Indonesia's West Papua," Time (Time, August 29, 2019), <https://time.com/5664107/indonesia-west-papua-independence-protests/>.

²¹ Human Rights Watch, "Indonesia: Investigate Deaths of Papuan Protesters," Human Rights Watch, October 28, 2020, <https://www.hrw.org/news/2019/09/07/indonesia-investigate-deaths-papuan-protesters>.

²² Al Jazeera, "More than 16,000 Flee Unrest in Indonesia's Papua Region," Al Jazeera Indonesia (Al Jazeera, October 7, 2019), <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/07/more-than-16000-flee-unrest-in-indonesias-papua-region/>.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pola serta eskalasi kekerasan yang terjadi pada akhir 2018 sampai dengan pertengahan 2019, penulis mengajukan pertanyaan penelitian utama berupa **“Mengapa hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka di Tanah Papua selalu melibatkan kekerasan?”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan mengapa kekerasan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan OPM tidak kunjung mereda, namun justru bereskalasi dengan meluasnya lingkup diskriminasi yang terjadi dan ketergantungan dalam menggunakan kekerasan sebagai upaya menggertak serta membungkam satu sama lain.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini berguna sebagai referensi dalam kasus antara Pemerintah Indonesia dan OPM dengan memperlihatkan proses terjadinya masalah dan akar permasalahan antara kedua belah pihak yang menyebabkan munculnya kekerasan pada tahun 2018-2019. Selain itu, dibuatnya karya ilmiah ini diharapkan berguna untuk memberikan perspektif baru dalam memahami kasus antara Pemerintah Indonesia dan OPM sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik.

1.4. Kajian Literatur

Kasus Papua Barat di Indonesia adalah topik yang hangat diperbincangkan dan diperdebatkan dalam tingkat lokal maupun internasional. Berbagai cara seperti kontrol militer, hak Otsus, dan pendekatan pembangunan infrastruktur, telah dilakukan oleh Indonesia guna menyelesaikan permasalahan dengan OPM. Meski demikian, kebijakan-kebijakan ini justru semakin memperkeruh masalah karena implementasinya yang tidak berjalan lancar sehingga membuat hubungan dengan OPM semakin renggang. Oleh sebab itu, penulis mengkaji beberapa literatur yang dianggap dapat membantu menentukan arah dari penelitian ini.

Dalam tulisannya yang berjudul “*The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies*”,²³ Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti berusaha menjelaskan bagaimana perkembangan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggapi permasalahan disintegrasi OPM dari rezim Soekarno sampai dengan Megawati Soekarnoputri. Bagi OPM, minimnya bantuan yang dari Pemerintah Indonesia yang saat itu sedang sibuk memperebutkan wilayah dengan Belanda menyebabkan berkembang sebuah identitas politik di antara OAP. Kesadaran mereka akan adanya *dual colonial structure* lahir dari kenyataan bahwa selama ini wilayah mereka dijajah tidak hanya oleh negara-negara Eropa dan Jepang tapi juga Indonesia, sehingga mendorong gagasan untuk sepenuhnya lepas dan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara dari sisi Indonesia, wilayah Papua Barat memiliki kedudukan yang sama dengan wilayah

²³ Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, *The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies* (Washington, DC, United States of America: East-West Center Washington, 2004).

Indonesia lainnya yang patut untuk dipertahankan dan rangkul. Namun terutama sejak Timor Timur (Timor Leste) lepas dari Indonesia, Pemerintah Indonesia melihat gerakan *self-determination* yang dilakukan OPM tidak dapat ditoleransi karena Indonesia tidak ingin kehilangan lagi salah satu bagian dari negaranya. Keadaan ini ditunjukkan dengan keengganan Indonesia untuk mengakui *rival nationalism* yang ditunjukkan OPM, penolakan peninjauan kembali Pepera, serta investigasi ulang parlemen Belanda.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia merupakan sebuah kombinasi pendekatan akomodatif dan represif. Kebijakan Otsus merupakan pendekatan yang menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Pertama, kebijakan ini diperkirakan dapat mengamankan Papua Barat untuk tetap bergabung dengan Indonesia, tetapi dapat juga memperkuat kedudukan kaum elite Papua Barat sehingga mampu melancarkan gerakan kemerdekaan dengan skala yang lebih besar. Sebelum kebijakan Otsus secara sempurna diimplementasikan, keadaan menjadi semakin rumit dengan disahkannya kebijakan pemekaran wilayah Papua Barat pada tahun 2003. Keadaan ekonomi-politik dari pasukan keamanan dan hubungannya dengan perusahaan sumber daya telah menciptakan zona konflik di Papua Barat juga semakin memperkeruh situasi. Terhitung sampai tulisan ini terbit dengan bagaimana pasukan keamanan setempat masih menjalankan tugasnya untuk mengontrol situasi konflik bersenjata di Tanah Papua, Pemerintah Indonesia tidak terlihat fokus untuk mencari resolusi terkait konflik ini. Segala ketegangan serta kebijakan yang ambigu dan ditambah dengan tindak penindasan serta alienasi

masyarakat semakin memperdalam *mistrust* dan skeptisisme OPM terhadap Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2006 dalam tulisan berjudul “*Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the International Community*”,²⁴ Timo Kivimäki menerbitkan kajian yang mencoba meneliti kemungkinan dialog untuk dapat mendorong proses perdamaian konflik di Papua Barat. Berangkat dari akar permasalahan, Kivimäki menjelaskan bahwa *deviations* dan *enemy perceptions* antara Pemerintah Indonesia dan OAP telah menciptakan konflik berkepanjangan yang *violent*.

Untuk menanggapi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan dialog yang berbeda dari yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dengan mengikutsertakan perwakilan dari militer Indonesia selaku aktor yang melakukan berbagai penindasan terhadap OAP, perwakilan OAP—yang tidak hanya mencakup anggota dari gerakan perlawanan yang ‘legal’ (seperti Presidium Dewan Papua [PDP] atau Majelis Rakyat Papua [MRP]), namun juga pihak ‘radikal’ seperti OPM—selaku aktor yang menuntut kemerdekaan, perwakilan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selaku aktor yang akan mempertimbangkan bila ada hukum yang berubah setelah negosiasi dilakukan, dan perwakilan kelompok migran di Papua Barat selaku aktor yang juga menjadikan OAP sebagai minoritas yang terdiskriminasi di wilayahnya sendiri. Kivimäki juga menekankan diperlukannya pihak ketiga yang secara netral bertugas untuk menjadi mediator dalam dialog yang melibatkan OAP dan Pemerintah

²⁴ Timo Kivimäki, *Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the International Community* (Washington, DC, United States of America: East-West Center Washington, 2006).

Indonesia. Selain aktor, Kivimäki juga mengidentifikasi *grievances* yang menjadi motivasi aktor dalam menggunakan kekerasan sebagai agenda yang harus ditelaah kembali dalam dialog yang akan dilakukan. Secara individu, motivasi ini merupakan sebuah upaya balasan dari sistem yang terlebih dahulu menekan rakyat Papua Barat, sementara secara umum, motivasi ini didorong oleh persepsi sejarah yang berbeda, posisi Papua Barat secara politik yang selama ini belum setara, budaya Papua Barat yang jarang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, pengakuan kasus keamanan terdahulu serta pencegahannya agar tidak terulang kembali, dan penanganan yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup OAP.

Menanggapi ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan OPM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian guna mencari akar permasalahan yang menghambat penyelesaian kasus Papua Barat dengan judul ***“Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future” (PRM 1)***²⁵ yang diterbitkan pada tahun 2008. Di dalamnya, laporan ini menemukan bahwa terdapat 4 akar hambatan penyelesaian yang saling terkait. Pertama, dampak marginalisasi dan diskriminasi terhadap perkembangan ekonomi OAP. Untuk menanggapi masalah tersebut diperlukan kebijakan yang mengakui terjadinya marginalisasi OAP. Di sini, kebijakan pemerintah diperlakukan sebagai jembatan dalam mempersiapkan OAP untuk dapat bersaing dengan kaum imigran dan juga dapat meningkatkan taraf hidup OAP. Kedua, kegagalan pembangunan terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta kegagalan dalam

²⁵ Muridan S. Widjojo et al., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future* (Jakarta, Indonesia: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2008).

memberdayakan ekonomi warganya. Oleh karena itu dibutuhkan paradigma pembangunan baru yang mengikutsertakan OAP: *Papuan Development*. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan terintegrasi mengenai kondisi geografi Papua Barat yang mempertimbangkan persebaran populasi di sana serta ikut menggabungkan unsur nilai budaya yang dianut oleh penduduk setempat ke dalam pelaksanaannya.

Selain itu, akar masalah ketiga adalah adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Indonesia dan OAP terkait sejarah dan identitas politik Papua Barat. Untuk menyamakan persepsi antara kedua belah pihak ini diperlukan sebuah dialog guna menghilangkan stigmatisasi dan membangun rasa percaya antara OPM dengan Pemerintah Indonesia. Dengan bercermin dari dialog antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kehadiran pihak ketiga dalam mediasi internasional terbukti penting untuk memastikan lancarnya dialog yang akan dilakukan. Terakhir, nihilnya akuntabilitas untuk segala kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Tanah Papua pada masa lampau. Dalam hal ini, diperlukan rekonsiliasi dan diadakan pengadilan atau *'revealing the truth'* terkait kasus-kasus HAM terhadap OAP sebagai langkah lanjutan dalam membangun dan mempertahankan rasa saling percaya antara keduanya. Restorasi hubungan ini nantinya dapat menjadi fondasi dalam melakukan proyek perkembangan pembangunan di Papua Barat yang berhasil. Namun, LIPI kembali menekankan bahwa sebanyak apa pun waktu dan kesempatan untuk membangun kembali rasa percaya dan rekonsiliasi dengan OAP akan terbuang sia-sia jika dialog tidak dilakukan.

Berikutnya, dalam laporan terbaru yang diterbitkan pada tahun 2017 berjudul *“Updating Papua Road Map: Peace Process, Youth Politics, and Papuan Diaspora” (PRM 2)*,²⁶ LIPI memperkuat pentingnya dialog sebagai sarana dalam membangun perdamaian dengan OAP. Meski tetap menekankan bahwa masalah yang dielaborasi pada buku sebelumnya secara relatif masih relevan karena tidak banyak pergerakan kebijakan yang terjadi hingga tahun 2017, LIPI memperbarui laporannya dengan fokus pada kemunculan unsur-unsur baru dalam dua aspek utama, yakni dialog sebagai sebuah pendekatan damai dengan OPM dan pemetaan aktor yang terlibat konflik di Papua Barat. Walau berbagai pihak telah secara resmi mengakui dialog sebagai jalan alternatif dalam resolusi konflik di Papua Barat sejak tahun 2009, LIPI menegaskan bahwa gagalnya upaya dialog yang selama ini dilakukan disebabkan oleh definisi dialog yang belum selaras antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Selain itu, berbeda dengan pemahaman di PRM 1 yang menyusun laporan dengan asumsi bahwa ‘dialog sebagai sebuah solusi’, dalam membahas masalah integrasi, status politik, dan identitas politik, penulisan PRM 2 mengacu kepada ‘dialog sebagai sebuah pendekatan’. Artinya, dialog diperlakukan oleh pihak terkait sebagai forum dalam mendiskusikan berbagai isu yang telah memicu permasalahan di Papua Barat atau sekedar membandingkan ideologi dan kepentingan aktor-aktor yang ada.

Terlepas dari segala kebijakan yang telah dikerahkan oleh pemerintah untuk menangani kasus ini, LIPI melaporkan bahwa kasus Papua Barat belum

²⁶ Adriana Elisabeth et al., *Updating Papua Road Map: Peace Process, Youth Politics, and Papuan Diaspora*, trans. Abellia Anggi Wardani (Jakarta, Indonesia: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017).

menemukan titik terang karena penanganannya yang masih mengabaikan kerumitan akar permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sorong dan Manokwari, pemerintah lebih terlihat untuk berfokus pada pembangunan infrastruktur daerah dibandingkan menguatkan komunikasi politik melalui pendekatan dialog yang diajukan. Menurut LIPI, Pemerintah Indonesia harus tetap penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu karena hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam kondisi sosial-ekonomi dan sosial-budaya di Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga harus mengganti strategi diplomasi dan komunikasi dalam menanggapi gerakan pemuda dan diaspora yang dibawanya karena bersatunya dan membesarnya suara OPM dapat menjadi kesempatan dan juga ancaman, tergantung dari tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia. Di luar dari ‘dialog nasional’, LIPI juga menyarankan langkah strategis berupa pendekatan dialog yang bersifat inklusif, atau yang ikut menggabungkan nilai budaya OAP, dalam pengimplementasian proses mediasi agar dapat mencapai rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang di Papua Barat.

Kemudian pada tahun 2020, I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Rumkabu, dan Yuliana Langowuyo dalam buku **“Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua”**²⁷ mencoba untuk merangkum temuan dari literatur-literatur yang telah dibuat sebelumnya dengan menggali alasan dan dampak marginalisasi yang mendorong disintegrasi untuk memperlihatkan urgensi agar segera dilakukan dialog. Sudira, Pamungkas,

²⁷ I Nyoman Sudira et al., *Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua* (Jakarta, Indonesia: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2020).

Aidulsyah, dkk menegaskan bahwa implementasi Otsus gagal dalam menghimpun OAP karena sistem politik di Papua yang berbasis kebudayaan, bukan pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Sebagai hasilnya, pendekatan yang selama ini dilakukan hanya menguntungkan para migran dan ini tentu memunculkan kecemburuan sosial yang mengarah pada rasa frustrasi dan proses marginalisasi OAP.

Berangkat dari sana, jalur dialog diajukan sebagai sebuah pendekatan yang mampu menjembatani dan meluruskan perbedaan cara pandang antar keduanya dalam membahas isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi. Di sini dibahas bahwa selain dari konsep dan strategi pembangunan Indonesia yang berbasis pada pertumbuhan dan ideologi sementara OAP lebih mengarah sistem kebudayaan dan nilai tradisional, marginalisasi OAP di Tanah Papua juga disebabkan oleh kurangnya mempersiapkan OAP dalam menghadapi perubahan sosial yang akan memberikan dampak drastis dalam hidup OAP. Oleh sebab itu, perlu memasukan beberapa poin dalam menyusun agenda dialog yang salah satu diantaranya adalah mengenai isu migran yang dapat dengan mudah menyebabkan konflik horizontal atau yang lebih fatal, yaitu disintegrasi.

Berdasarkan beberapa buku dan laporan yang telah dibahas, penulis melihat bahwa pembentukan identitas politik OAP yang disebabkan oleh pendekatan ambigu Pemerintah Indonesia dalam upaya mengintegrasikan wilayah Papua Barat adalah aspek yang penting dan menjadi fokus dalam penelitian yang berusaha untuk mengkaji akar permasalahan kekerasan di kasus Papua Barat supaya dapat segera terselesaikan. Sependapat dengan Chauvel, Bhakti, dan Kivimäki, penulis juga

melihat bahwa penetapan struktur masyarakat yang semakin menekan dan mengalienasi OAP ikut memperdalam *deviations* dan *enemy perceptions* sehingga menciptakan bentrok vertikal yang dipenuhi kekerasan tak berkesudahan antara OPM dan Pemerintah Indonesia. Ditambah lagi melihat aspek marginalisasi OAP seperti yang telah dijabarkan oleh Sudira dkk, penulis juga setuju bahwa bila tidak segera diambil langkah lanjutan akan mendepopulasi OAP dan menekannya ke arah disintegrasi dengan Indonesia. Segala manuver kebijakan yang jarang membuahkan hasil dari waktu ke waktu karena target dan implementasi yang berfokus pada permasalahan di tingkat permukaan atau yang masih mengabaikan kerumitan akar permasalahan kasus Papua Barat, seperti dalam laporan LIPI, hanya akan memperdalam *mistrust* dan skeptisisme sehingga terus menghambat proses restorasi hubungan antar keduanya. Meski demikian, dalam penelitian ini penulis akan lebih mengeksplorasi akar permasalahan dengan mengangkat bentrok pada tahun 2018-2019 sebagai studi pustaka utama serta memperdalam dimensi internasional dalam konflik Papua Barat untuk kekosongan penelitian lampau dengan bantuan Teori PSC.

1.5. Kerangka Pemikiran

Seiring berjalannya waktu, pola dan dinamika konflik di dunia bergeser dari perang konvensional dan nuklir dengan negara sebagai fokus pembahasannya, kemudian meluas dengan munculnya *wars of the third kind*, jenis perang yang berdasar pada disparitas kekuatan antara entitas besar dengan suatu entitas yang

lebih kecil.²⁸ K. J. Holsti menjelaskan perang tersebut sebagai konflik yang dilakukan sebuah komunitas sebagai usaha ‘pembebasan nasional’, atau konflik yang melibatkan gerakan perlawanan sekelompok masyarakat terhadap penguasaan, penganiayaan, atau perampasan wilayah dan sumber daya oleh negara pasca-kolonial.²⁹ Berangkat dari sana, Edward E. Azar dalam teori *Protracted Social Conflict* (PSC) memaparkan bahwa rasa frustrasi (*frustration*) kelompok komunal karena kebutuhan dasar—terutama keperluan akan pengakuan dan dukungan terhadap identitas seseorang atau kelompok—yang tidak terpenuhi (*deprivation*) bakal menjadi katalisator utama terjadinya perlawanan berkepanjangan yang sering kali menggunakan kekerasan (*aggression*).³⁰ Asumsi ini didorong dengan peranan negara yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya demi menyejahterakan dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat.

Dalam mengkaji perdamaian, Johan Galtung dalam salah satu tulisannya mendefinisikan kekerasan sebagai rintangan dari pemenuhan kebutuhan dasar, yang di mana manusia akan berjuang mati-matian untuk bisa bertahan hidup dan kemakmurannya (sandang, pangan, papan) lebih dari apapun.³¹ Galtung membedakan bentuk-bentuk kekerasan menjadi *direct violence* yang seperti

²⁸ Edward Earl Rice, *Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries* (Berkeley, California: University of California Press, 1990), p. 18-19.

²⁹ Oliver Ramsbotham, “The Analysis of Protracted Social Conflict: A Tribute to Edward Azar,” *Review of International Studies* 31, no. 1 (January 2005): pp. 109-126, <https://doi.org/10.1017/s0260210505006327>, p. 111.

³⁰ Edward Earl Azar and Nadia Farah, “The Structure of Inequalities and Protracted Social Conflict: A Theoretical Framework,” *International Interactions* 7, no. 4 (1981): pp. 317-335, <https://doi.org/10.1080/03050628108434558>, p. 327-330.

³¹ Johan Galtung, “Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses,” *Journal of Peace Research* 22, no. 2 (1985): pp. 141-158, p. 146-147.

namanya merupakan kekerasan yang memang terencana dan juga mudah teridentifikasi; sementara *structural violence* adalah kekerasan yang tidak sengaja terjadi karena dilakukan melalui proses yang lama hingga akhirnya mencelakakan manusia.³² Namun selain itu Johan juga menjelaskan bentuk *cultural violence* sebagai aspek kultural apapun yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam bentuk *direct* maupun *structural*.³³ Merujuk ke dalam kajian *Galtung's conflict triangle* yang menjelaskan bahwa pada setiap konflik selalu ada *contradiction* (C), *attitude* (A), dan *behaviour* (B), masing-masing bentuk kekerasan ini melekat kepada setiap siku dari segitiga konflik tersebut. Dimulai dengan meresolusi *direct violence* dengan mengubah B dari konflik itu sendiri, memudahkan *structural violence* dengan menghapus C dan ketidakadilan struktural, dan meredakan *cultural violence* dengan mengganti A terhadap persoalan tertentu.³⁴

Berlangkah kembali ke PSC, Azar menetapkan 4 prasyarat yang harus terpenuhi guna menggolongkan suatu masalah masuk dalam ranah PSC: (1) Hubungan identitas kelompok komunal dengan pemerintah; (2) Gagalnya pemenuhan kebutuhan, terutama dalam bidang keamanan, pembangunan, identitas, atau politik; (3) Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan (4) Hubungan antar pemerintah negara dengan sistem internasional.³⁵ Azar juga memperjelas jika 4 prasyarat tersebut sudah terpenuhi, ada dinamika yang harus diperhatikan: (1) Tindak dan strategi kelompok komunal

³² Ibid.

³³ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (August 1990): pp. 291-305, p. 291-292.

³⁴ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflicts*, 2005, p. 19.

³⁵ Ibid, p. 88-91.

yang dapat dilihat dari pembentukan identitas, kepemimpinan, pergerakan, tujuan-tujuan politik, dan taktik dalam mencapai tujuan tersebut; (2) Tindak dan strategi negara yang dapat dilihat dari pendekatan atau kebijakan yang dikerahkan dalam merespons gerakan kelompok komunal; dan (3) Mekanisme bawaan konflik yang dapat dilihat dari pengalaman, kepercayaan, atau ketakutan yang membentuk kesan negatif sehingga menciptakan antagonisme kelompok dan memperkuat PSC.³⁶

Berbeda dengan pandangan tradisional yang mengukur kekuatan negara dari sisi kemampuan ekonomi dan militer saja, Barry Buzan dalam tulisannya yang berjudul “*National Security and the Nature of the State*” menjabarkan beberapa komponen untuk dapat menentukan jika kemampuan suatu negara itu terbilang kuat (mampu) atau lemah (tidak mampu): gagasan, kelembagaan, dan basis fisik suatu negara.³⁷ Pertama, menelaah gagasan dilakukan untuk melihat arah tujuan yang telah disusun berdasarkan apa yang dipersepsikan sebagai fokus keamanan nasional. Aspek ini dapat dikaji dengan mengidentifikasi ideologi yang dianut dan hubungan yang dibangun dengan entitas kultural yang ada di negara. Lalu, aspek kelembagaan dapat dilihat dari keseluruhan pemerintahan, termasuk badan legislatif, administratif, dan yudisial beserta hukum, norma, dan prosedur lainnya yang membantu proses ketatanegaraan. Poin kajian kelembagaan merupakan institusi yang bertugas untuk memenuhi apa yang ingin dicapai dalam gagasan negara dengan melihat konteks dan prioritas kepentingan nasional yang lebih utama pada suatu periode. Terakhir tapi tidak kalah penting, aspek basis fisik negara yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Barry Buzan, “National Security and the Nature of State,” in *People, States, & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 2nd ed. (Brighton, Sussex, UK: Wheatsheaf Books, 1983), p. 36-44.

meliputi wilayah dan populasi yang saling terikat sebagai hal yang harus dipertahankan dan lindungi.³⁸

Kemampuan negara dalam pembahasan Buzan tidak selalu berhubungan dan bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi negara, melainkan berbentuk spektrum berdasarkan kombinasi dari tiga komponen yang menghasilkan daya paham yang berbeda terhadap ancaman dan prioritas negara yang multidimensi. Keberadaan negara yang lebih kuat dibandingkan negara lainnya hanya mencerminkan waktu lebih yang dilalui suatu negara dalam mematangkan dan mengembangkan dirinya.³⁹ Di sini, negara yang kuat lebih cenderung berfokus pada ancaman dan campur tangan eksternal sebab gagasan, lembaga, dan basis fisik yang telah terdefinisi dengan jelas dapat memfasilitasi keamanan masing-masing komponen negara dengan sendirinya.⁴⁰ Negara yang lemah akan mempersepsikan ancaman dari dalam negeri sebagai sesuatu yang dapat membahayakan keamanan pemerintah negara karena belum mampu menyediakan struktur sosial-politik yang kuat dan stabil.

Poin identitas dalam prasyarat PSC Azar berkaitan erat dengan konsep *self-determination*.⁴¹ Menurut *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1966, *self-determination* pada dasarnya diartikan sebagai hak semua orang untuk menentukan kedudukan politik serta hak untuk mengatur

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, p. 65-66.

⁴⁰ Ibid, p. 66.

⁴¹ Edward Earl Azar, Paul Jureidini, and Ronald McLaurin, "Protracted Social Conflict: Theory and Practice in the Middle East," *Journal of Palestine Studies* 8, no. 1 (1978): pp. 41-60, p. 50.

perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas.⁴² Terdapat 2 bentuk *self-determination*: secara internal, berupa tuntutan rakyat mengenai perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalam kerangka negara yang saat ini mereka tempati dan secara eksternal yang mengarah ke hak untuk pemisahan diri seutuhnya.⁴³ Di bawah hukum internasional, *external self-determination* hanya digunakan sebagai pilihan akhir atau bila tuntutan masyarakat untuk *internal self-determination* tidak dikabulkan.⁴⁴ Konsep ini dibuat untuk membahas banyak aspek, beberapa di antaranya: hak individu atau minoritas, otonomi daerah, penindasan pemerintah, mengklaim kemerdekaan, dan kedaulatan negara.⁴⁵ Dalam pengkajian *Helsinki Final Act*, konsep *self-determination* sering dikaitkan dengan ***territorial integrity*** yang menyatakan bahwa dengan adanya prinsip ‘menentukan diri sendiri’, negara memiliki kewenangan untuk mengurus urusan domestiknya sendiri dan kewenangan untuk menjaga keutuhan wilayahnya tanpa campur tangan pihak ketiga.⁴⁶

Dalam menggunakan PSC sebagai instrumen analisis, Azar memfokuskan kajian teorinya pada penyebab dari ketidaksetaraan dan struktur kekuatan politik serta bagaimana keduanya dapat mengartikulasikan proses terbentuknya

⁴² United Nations State Members, “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” in *United Nations Human Right Office of the High Commissioner*, 1966, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>.

⁴³ Johan D. Van Der Vyver, “Self-Determination of the Peoples of Quebec Under International Law,” *Journal of Transnational Law and Policy* 10, no. 1 (2000): pp. 1-35, p. 11-12.

⁴⁴ Iñigo Urrutia Libarona, “Territorial Integrity and Self-Determination: The Approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo,” *REAF - Journal of Self-Governance*, no. 16 (October 16, 2012): pp. 107-140, p. 109-110.

⁴⁵ Patricia Carley, “Self-Determination: Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession,” March 1996, <https://www.usip.org/sites/default/files/pwks7.pdf>, pp. 1-18, p. 8-9.

⁴⁶ Iñigo Urrutia Libarona, “Territorial Integrity and Self-Determination: The Approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo,” *REAF - Journal of Self-Governance*, no. 16 (October 16, 2012): pp. 107-140, p. 108-109.

kekerasan.⁴⁷ Pendekatan *top-down* berupa pemberian imbalan atau penjatuhan hukuman oleh *bureaucratic managers* terhadap pihak lawan hanya akan menekan *behavioral violence* dan menahan tumpahnya atau meluasnya konflik untuk sementara waktu, tidak menyelesaikan *structural violence* seutuhnya. Pendekatan melalui jalur hukum—termasuk arbitrase, mediasi, *conciliation*, *legal awards*, dan negosiasi langsung—juga dianggap tidak terlalu manjur dalam menyelesaikan permasalahan ini karena berfokus pada hasil akhir konflik yang *win-lose* atau *zero-sum* sementara isu PSC yang cenderung *negative-sum*.⁴⁸ Azar menggarisbawahi signifikansi rezim dan peranan negara ini dalam memicu atau mencegah terjadinya eskalasi PSC.⁴⁹ Anggapan ini didukung dengan banyaknya penelitian yang membuktikan adanya korelasi antara tindak-tanduk pemerintah yang mengandalkan represi atau segala bentuk pelanggaran HAM lainnya dalam menanggapi protes atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan eskalasi konflik internal yang lebih dalam.⁵⁰ Terlebih, meski secara domestik sistem yang cacat adalah umpan yang sangat efektif sebagai cikal bakal PSC, Azar juga mengutarakan tidak kalah pentingnya untuk mengobservasi peran struktur eksternal bersamaan dengan faktor kebencian dan ketidaksetaraan domestik dalam melihat proses eskalasi PSC.⁵¹

⁴⁷ Ibid, pp. 328-329.

⁴⁸ John Davies and Edy Kaufman, *Second Track/Citizens' Diplomacy: Concepts and Techniques for Conflict Transformation* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003), pp. 318, p. 15-30.

⁴⁹ Oliver Ramsbotham, "The Analysis of Protracted Social Conflict: A Tribute to Edward Azar," *Review of International Studies* 31, no. 1 (January 2005): pp. 109-126, <https://doi.org/10.1017/s0260210505006327>, p. 123-124.

⁵⁰ David Cingranelli et al., "Human Rights Violations and Violent Internal Conflict," *Social Sciences* 8, no. 2 (2019): pp. 41-74, <https://doi.org/10.3390/socsci8020041>, p. 42-44.

⁵¹ Edward E. Azar and Nadia Farah, "The Structure of Inequalities and Protracted Social Conflict: A Theoretical Framework," *International Interactions* 7, no. 4 (1981): pp. 317-335, <https://doi.org/10.1080/03050628108434558>, p. 319-321.

Senada dengan Azar, Michael E. Brown juga menekankan bahwa dari satu atau lain aspek, sebagian besar konflik internal yang berlarut-larut pasti memiliki sangkut paut dengan lingkungan regional atau internasional karena kemampuannya untuk dapat melibatkan negara-negara tetangga, merusak stabilitas regional, atau bahkan mempengaruhi kepentingan aktor yang secara geografis berada jauh dari tempat konflik internal terjadi. Namun selain ‘mempengaruhi’, Brown juga menjelaskan bahwa variabel sistem internasional pun dapat menjadi katalis yang menyebabkan sebuah konflik internal menjadi lebih *violent* atau semakin berlarut-larut. Di samping *bad leader* dan *bad domestic problem* yang menjelaskan katalis dalam lingkup domestik, Brown juga membagi faktor *proximate* menjadi 2 yang berbasis pergerakan eksternal: *bad neighbors* yang berorientasi pada keputusan-keputusan pemerintah negara lain untuk ‘menggoyang’ negara lainnya yang secara domestik memang sudah tidak stabil demi mencapai kepentingannya nasionalnya sendiri dan *bad neighborhoods* yang dipicu oleh ‘*spillover*’, ‘*contagion*’ dan ‘*diffusion*’ dari negara tetangganya.⁵²

Selanjutnya mengingat kembali jika konsep ‘kebutuhan’ merupakan sesuatu yang universal, tidak bisa ditawar, dan memang bukan merupakan tipe isu yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka Azar menganjurkan pendekatan yang bersifat progresif dan dapat menyokong perkembangan berkelanjutan sehingga dapat menopang perdamaian yang ingin dibentuk.⁵³ Pendekatan ini lebih berorientasi terhadap kalangan yang berada di tingkat

⁵² Michael E. Brown, *Nationalism and Ethnic Conflict* (Cambridge, Mass: MIT Press, 2001), p. 13-17.

⁵³ John Davies and Edy Kaufman, *Second Track/Citizens' Diplomacy: Concepts and Techniques for Conflict Transformation* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003), pp. 318, p. 29-30.

grassroot dalam rangkaian proses konsultasi dan negosiasinya yang bersifat *problem solving*, di mana perwakilan dari masing-masing pihak yang bersengketa dapat saling berdiskusi mengenai keluhan satu sama lain di bawah arahan fasilitator yang netral tanpa adanya keharusan untuk langsung bernegosiasi. Langkah ini tidak hanya ditujukan agar mampu membangun *interpersonal trust*, tapi juga menghasilkan iklim dialog konstruktif—di mana di dalamnya akan membedakan yang mana isu kepentingan dan yang mana isu kebutuhan—yang mampu menghasilkan sekumpulan terobosan atau ide sebelum masuk ke babak negosiasi.⁵⁴

Pengelolaan konflik tersebut lalu berlanjut ke 2 langkah yang paling esensial: (1) ***Structural development*** dalam tingkat domestik yang akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan kelompok komunal, termasuk mengurangi ketidaksetaraan struktural (secara politik, ekonomi, atau sosial), mengubah strategi pembangunan yang lebih berfokus untuk memperbaiki ketidakseimbangan regional, sektoral, atau komunal, dan terus memperbarui struktur sosial-politik untuk mendistribusikan ulang *power* dengan memecah dan mendelegasikan sambil mengedepankan pembentukan institusi dan konsensus antara satu sama lain; dan (2) Penerapan ***development diplomacy*** yang sesuai dengan keadaan khusus dari masing-masing kasus PSC sebagai sebuah kerja sama internasional yang berfungsi untuk mengurangi viktimisasi struktural sehingga dapat memperkecil kemungkinan berlanjutnya siklus keji PSC.⁵⁵ Hal tersebut kembali didukung oleh Brown yang

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Edward E. Azar and Chung In Moon, “Managing Protracted Social Conflicts in the Third World: Facilitation and Development Diplomacy,” *Millennium: Journal of International Studies* 15, no. 3 (1986): pp. 393-406, <https://doi.org/10.1177/03058298860150030601>, p. 399-404.

mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mencegah, mengelola, dan meresolusi konflik yang telah berkembang, mengingat dimensi internasional yang hadir dalam konflik internasional.⁵⁶

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** yang berdasar pada observasi atau interpretasi dari seorang individu terhadap sebuah peristiwa yang nantinya akan membentuk kesimpulan substantif dan memunculkan *new understanding*.⁵⁷ Metode ini dilakukan melalui 6 tahap: (1) pembentukan pertanyaan penelitian, (2) pemilihan subjek, (3) pengumpulan data, (4) interpretasi data, (5) analisis melalui kerangka teoretis, (6) penulisan kesimpulan.⁵⁸ Mengingat penelitian dalam HI memusatkan perhatian pada gagasan, identitas, norma, dan budaya dalam politik internasional dan hubungan-hubungan dalam masyarakat dunia pada umumnya,⁵⁹ penulis memfokuskan diri untuk menjelaskan (*explaining*) atau menggambarkan makna, wacana, dan representasi sosial dengan memperhatikan kompleksitas, detail, dan konteks yang mendasari kasus yang dikaji dalam penelitian ini.⁶⁰ Selain itu,

⁵⁶ Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflict* (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), p. 571-628.

⁵⁷ Shahid N. Khan, "Qualitative Research Method: Grounded Theory," *International Journal of Business and Management* 9, no. 11 (2014): pp. 224-233, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n11p224>, p. 225.

⁵⁸ Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 378-379.

⁵⁹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2015), p. 104-106.

⁶⁰ Jennifer Mason, *Qualitative Researching*, 2nd ed. (Los Angeles: SAGE Publication, 2002), p. 56.

penulis menggunakan pendekatan **studi pustaka** yang mengembangkan deskripsi dan analisis yang mendalam dari dinamika masalah antara OPM dan Pemerintah Indonesia.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan media data sekunder dengan teknik studi kepustakaan dalam melakukan penelitian ini. Sumber data yang dimaksud terdiri tapi tidak terbatas pada: laporan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dalam bentuk fisik maupun digital oleh pemerintah, organisasi, ataupun cendekia yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituliskan ke dalam lima bab dengan pembagian sebagai berikut. **Bab 1** memuat **rancangan penelitian** yang memaparkan fondasi dari penelitian ini, yang memuat latar belakang masalah, deskripsi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, **Bab 2** membahas **Organisasi Papua Merdeka** sebagai salah satu variabel dependen yang sedang diteliti. Di sini penulis menarasikan kemunculan, pembentukan identitas, kebutuhan dasar, dan munculnya kelembagaan OPM secara lebih dalam.

Lalu **Bab 3** menelaah latar belakang dari **Pemerintah Indonesia** sebagai oposisi dari OPM. Di dalamnya menjelaskan kemampuan dan nilai yang dianut oleh

Pemerintah Indonesia serta pengaruh variabel tambahan sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang pada pengimplementasiannya memberatkan OPM.

Pada **Bab 4** mengkaji **dinamika hubungan antara OPM dan Pemerintah Indonesia** dengan menganalisis unsur-unsur utama dalam isu Papua Barat dengan teori *Protracted Social Conflict* oleh Edward Earl Azar yang terdapat di bagian kerangka pemikiran. Beberapa poin utama yang dikaji adalah bagaimana perkembangan identitas OPM dan keadaan struktur atau sistem Pemerintah Indonesia yang ada justru mendorong eskalasi konflik hingga menggunakan kekerasan, terutama dalam bentrokan tahun 2018-2019.

Terakhir, **Bab 5** menutup penelitian ini dengan menyatukan seluruh temuan dari penelitian dan mengambil **kesimpulan dan saran** dari temuan-temuan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dari data yang telah dielaborasi pada bab sebelumnya.